

Bulan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Dari Media



BPK Perwakilan
Provinsi Gorontalo

Tanggal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Tahun

2	0	2	0
---	---	---	---

RGOL.ID	Online	Provinsi/Babupaten/Kota Gorontalo.....
---------	--------	---

Sosialisasi Tugas dan Fungsi BPK ke Insan Pers Gorontalo

<https://rgol.id/sosialisasi-tugas-dan-fungsi-bpk-ke-insan-pers-gorontalo/>



RGOL.ID - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), perwakilan Provinsi Gorontalo. Kembali mensosialisasikan perannya sebagai lembaga negara yang memiliki wewenang, memeriksa, pengelolaan keuangan negara. Namun demikian hasil pemeriksaan BPK –RI, tidak serta merta mudah diakses oleh pers, Laporan Sahril Rasid. Ini ditegaskan langsung Kepala BPK RI –Perwakilan Provinsi Gorontalo Rahmadi SE.M.M.Ak. Dihadapan direksi dan puluhan wartawan. Karena sesuai dengan UUD 1945, amandemen ke ketiga, pasal 23, poin 2 ditegaskan.

Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada, dewan perwakilan rakyat, sesuai dengan kewenangannya. Poin 3, Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan /atau badan sesuai dengan undang undang. “Jadi bukan kami sengaja tidak ingin menginformasikan. Tapi sesuai mekanisme UU demikian. Jika kami melanggar, maka kami bisa disanksi karena melanggar kode etik,” ujarnya menjawab sejumlah pertanyaan wartawan saat media workshop yang digelar di ruang auditorium BPK RI perwakilan Provinsi Gorontalo Kamis (10/9) kemarin.

Ia menambahkan setelah diserahkan ke DPR barulah hasil pemeriksaan BPK itu bisa dikonsumsi public, termasuk insan pers. Saat itu juga Rahmadi mengatakan, dalam waktu dekat ini mereka akan melakukan pemeriksaan terkait dengan pemanfaatan dana Covid 19. “ Dalam waktu dekat mulai akan dilaksanakan. Ini sudah menjadi tugas dari BPK-RI,” katanya. “terkait keuangan negara, tentunya menjadi tugas kami.

Termasuk juga pemanfaatan dana penanganan Covid 19,” kata Rahmadi menjawab pertanyaan wartawan. Dijelaskan Rahmadi, pers menjadi mitra sangat penting. Sehingga itu BPK selalu dekat dengan pers di daerah. pers merupakan menyebar informasi tercepat, sehingga itu ia berharap BPK dan pers akan selalu menjadi lembaga pengawas, untuk mencegah dan menyelamatkan keuangan negara,’ kata Rahmadi disambut dengan aplaus.



BPK menurutnya bukanlah lembaga tertutup. Iapun mempersilahkan jika ada hal yang akan dikonfirmasi ke BPK. “ Silahkan, bisa langsung ke bagian Sub Bagian Humas, nanti ketemu pak Radhityo,’ kata Rahmadi dalam sambutannya. “Walaupun tidak semua informasi kami buka.tapi banyak hal penting juga yang bisa kami klarifikasi untuk kepentingan masyarakat,’ tambahnya lagi.

Sementara itu kepala Sub auditorat Sarjono menjelaskan, entitas pemeriksaan BPK RI Provinsi Gorontalo mencakup pemerintah provinsi Gorontalo dan Kabupaten Kota. Jenis pemeriksaan BPK itu mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan PDDT. “ Kami juga menganalisa trend rasio LKPD pemerintah daerah se Provinsi Gorontalo, mencakup trend pendapatan, tren belanja berdasarkan kelompok belanja, rasio belanja terhadap total belanja, dan rasio belanja modal terhadap total belanja, dan rasio belanja pegawai terhadap total belanja.

”Namun sekali lagi, sesuai penjelasan kepala BPK . Informasi hasil pemeriksaan yang sudah diserahkan ke DPRD’ ujar Sarjono sambil menjelaskan tren rasio LKPD pemerintah daerah se Gorontalo tahun 2019 lalu.

Sementara itu kepala Sub Bagian Humas Radhityo mengatakan workshop atau media visit ke perusahaan pers di Gorontalo sudah menjadi agenda tahunan. Ke depan workshop seperti ini akan dilaksanakan lagi,sebagai sarana komunikasi antara BPK RI dan insan pers di Provinsi Gorontalo.

Diambil dari RGOL.ID.Hari Jum’at, Tanggal 11 September 2020